

LAPORAN KINERJA

Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Sumatera Utara



2022



Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
Desember 2022

SCIENCE · INNOVATION · NETWORKS

LAPORAN KINERJA

**BALAI PENGKAJIAN
TEKNOLOGI
PERTANIAN SUMATERA
UTARA**

TAHUN 2022



**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
SUMATERA UTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DESEMBER 2022**

LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2022

Penanggung Jawab:
Kepala BPTP Sumatera Utara,
Dr. Khadijah EL Ramija, SPI, MP

Tim Penyusun:
Siti Maryam Harahap
Ahmad Tohir Harahap
Mustafa Hutagalung
Listiawati
Deliana Putri Agriawati
Lely Zulhaida Nst
Nurmalia
Muhammad Fadly
Sri Endah Nurzannah
Sri Romaito Dalimunthe

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DESEMBER
2022**

KATA PENGANTAR



Penyusunan LAKIN (Laporan Kinerja) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara sebagai salah satu instansi pemerintah merupakan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas kinerjanya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No: 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diharuskan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua Badan Litbang Pertanian melakukan transformasi kelembagaan. Meskipun demikian, upaya pencapaian indikator kinerja pada sasaran program tetap dilaksanakan sehingga akuntabilitas kinerja instansi dapat terus ditingkatkan. Informasi ringkas yang disampaikan dalam laporan ini masih jauh dari sempurna, namun demikian diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Medan, Desember 2022
Kepala Balai,

Dr. Khadijah EL Ramija, SPI, MP
NIP. 19690228 199603 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BB Pengkajian), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 44 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Pasal 118 bahwa Balai Pengkajian Teknologi Pertanian memiliki tugas melaksanakan pengkajian, perakitan, pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Pada tahun 2022, Berdasarkan Penetapan Kinerja Balai dengan kepala Balitbangtan, BPTP Sumatera Utara mengimplementasikan Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan Teknologi, untuk mencapai tiga sasaran program yang akan dicapai yaitu: 1) meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian spesifik lokasi, 2) terwujudnya birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, 3) terkelolanya anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Penetapan Kinerja Balai mengalami revisi pada tanggal 17 Desember 2022 karena adanya transformasi kelembagaan yang terjadi di Badan Litbang Pertanian.

Berdasarkan pengukuran kinerja, capaian realisasi anggaran kegiatan tahun 2022 sebesar 92%. Secara keseluruhan realisasi capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan yang ada di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pada aspek pengelolaan anggaran, BPTP Sumut berdasarkan DIPA Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2022, mengelola anggaran sebesar Rp. 44.287.850.000- (empat puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah mengalami beberapa kali revisi terakhir, revisi ke-11 jumlah pagu menjadi Rp. 41.691.800.000- (empat puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Realisasi Keuangan atas dasar SP2D sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 Rp. 38.354.658.515,- (92 %).

Keberhasilan capaian kinerja tersebut antara lain disebabkan oleh: 1) kesiapan dan kelengkapan dokumen yang tepat waktu, 2) intensifnya kegiatan pertemuan masing-masing tim penanggung jawab, serta proposal dan pertemuan lainnya, serta 3) sumbangsih substansi teknis dari para narasumber dalam forum seminar proposal dan pertemuan lainnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi	4
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Visi	11
2.2 Misi	11
2.3 Tujuan	12
2.4 Sasaran	13
2.5 Kegiatan	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	18
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja TA. 2022 dengan Target Renstra 2020 – 2024	19
3.1.2 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	20
IV. AKUNTABILITAS KEUANGAN	
4.1 Realisasi Anggaran	46
4.2 Pengelolaan PNBK	47
V. PENUTUP	
5.1 Ringkasan Capaian Kinerja	49
5.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	50
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Pembiayaan APBN Tahun 2022	14
2. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022 BPTP Sumut	16
3. Tingkat Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Sasaran TA. 2022	21
4. Capaian Kinerja Indikator Pada Sasaran 1	23
5. Capaian Kinerja Indikator Pada Sasaran 2	40
6. Mitra Kerjasama 2022	43
7. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan Tahun Anggaran 2022	46
8. Rincian PNBPA TA. 2022	48

DAFTAR GAMBAR

- | | |
|---|----|
| 1. Bagan Struktur Organisasi BPTP Sumatera Utara | 6 |
| 2. Komposisi SDM Fungsional BPTP Sumatera Utara Sampai Akhir Tahun 2022 | 7 |
| 3. Sebaran Pendidikan Tenaga Fungsional Peneliti, Penyuluh dan fungsional lainnya BPTP Sumatera Utara sampai akhir tahun 2022 | 8 |
| 4. Grafik Capaian Nilai Kinerja Anggaran | 43 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala BPTP Sumut 13 Desember 2021
2. Surat Keputusan Nilai Pembangunan Zona Integritas
3. Progres Kegiatan pada Pelaporan Aplikasi Smart

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran penting terhadap ekonomi nasional, yang dapat dilihat dari kontribusi terhadap produk bruto, penyerap tenaga kerja, neraca perdagangan, penyedia bahan pangan, pakan dan bahan baku, serta sumber pendapatan masyarakat di pedesaan. Program penelitian dan pengkajian di bidang pertanian mengacu pada tantangan tersebut sehingga diharapkan dapat mendukung program pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian khususnya dan program pertanian di Indonesia pada umumnya.

Beberapa tahun ke depan, pertanian di Indonesia akan lebih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan laju pertumbuhan penduduk, perubahan iklim global, kelangkaan sumber energi, dan dinamika pasar global. Secara teknis, berbagai permasalahan terkait sumberdaya lahan dan tenaga kerja juga menjadi tantangan tersendiri yang cukup pelik bagi pembangunan pertanian ke depan. Oleh sebab itu, perlu dicermati dan diidentifikasi potensi (kekuatan dan peluang) maupun permasalahan dan kendala serta implikasinya terhadap sektor pertanian (Kementerian Pertanian, 2014).

Pembangunan pertanian tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Berdasarkan arahan dari kebijakan nasional tersebut, maka upaya pemenuhan kebutuhan pangan masih menjadi hal yang utama, disamping perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan harus menjamin kesejahteraan petani. Arah kebijakan pembangunan pertanian saat ini adalah mengembangkan nilai tambah kegiatan pertanian melalui penerapan konsep pertanian

bioindustri (Kementerian Pertanian, 2014). Upaya mendukung arahan pembangunan pertanian tersebut, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut yang merupakan salah satu institusi Kementerian Pertanian (*Leading Agent Ministry*) Negara Indonesia dalam pembangunan pertanian, mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan memenuhi Peraturan Presiden RI Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan RB No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPTP Sumatera Utara Tahun 2022 merupakan LAKIN dari tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan LAKIN BPTP Sumatera Utara mengacu pada PERMENTAN No 45/ PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementan. BPTP Sumut melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggung jawaban kinerja dalam mendukung pembangunan pertanian tersebut. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAKIN memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

LAKIN yang selama ini disusun dan disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan, harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan, sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. LAKIN bermanfaat bagi dilaksanakannya Evaluasi Kinerja. Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN), antara lain sebagai media hubungan kerja organisasi, media akuntabilitas, media informasi umpan balik perbaikan kinerja dan LAKIN sebagai instrumen peningkatan kinerja berkesinambungan.

Terdapat empat kata kunci dalam penyusunan LAKIN yaitu: *Plan, Do, Check, Act*. *Plan* (perencanaan) artinya LAKIN sebagai bahan dalam menyusun Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja untuk tahun yang akan datang. *Do* (pelaksanaan) artinya LAKIN sebagai alat dalam melaksanakan, memantau, mengukur kinerja kegiatan suatu instansi. *Check* (Evaluasi) maksudnya LAKIN dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. *Act* (aksi), artinya LAKIN sebagai bahan untuk perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan publik.

Dasar hukum yang melandasi penyusunan LAKIN 2022 ini adalah: 1) Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 2) Undang undang, yang terdiri dari: UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan 3) Permenpanrb No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi BPTP Sumatera Utara

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) di Provinsi Sumut, melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pengkajian yang mengacu kepada Permentan No. 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPTP. Tugas dan fungsi BPTP mengalami perubahan, terhitung mulai bulan Mei 2017, BPTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan pengembangan dan diseminasi teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi dengan fungsi :

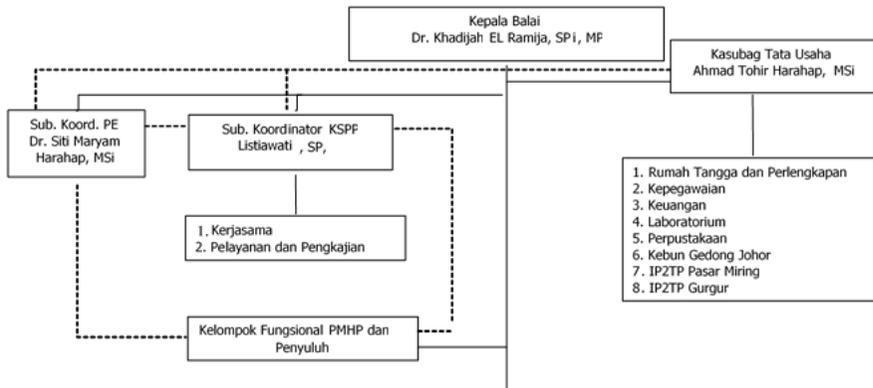
1. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
3. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
4. Pelaksanaan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
5. Perakitan materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
6. Pelaksanaan bimbingan teknis materi penyuluhan dan diseminasi hasil pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi
7. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi
8. Pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi

9. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BPTP.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Sebagai unit kerja di daerah, BPTP Sumut dikembangkan menjadi salah satu institusi sumber data dan informasi pertanian, sehingga dapat memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan pertanian di wilayah Provinsi Sumut.

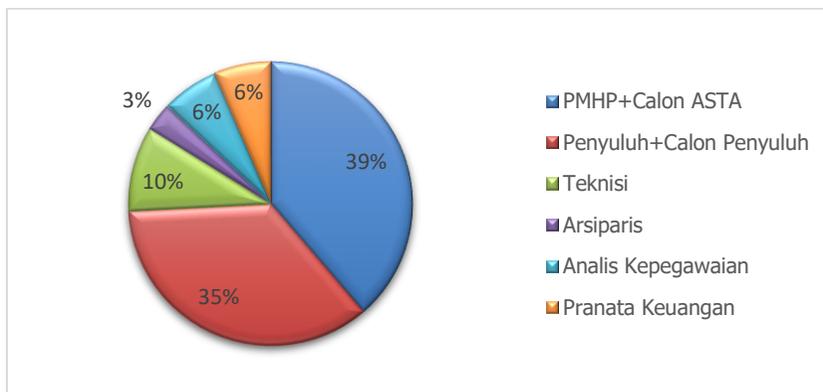
Sebagai salah satu unit kerja di bawah Eselon II, BPTP Sumut dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan Eselon IIIa. Dalam menjalankan tugas, Kepala BPTP Sumut dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Subkoordinator Kerjasama. Koordinator Program dan Evaluasi (Gambar 1).

Dinamika litkajibangrap berdasarkan UU No 111 tahun 2019 tentang sistem nasional IPTEK, dan Perpres No 78 tahun 2021 tentang peleburan lembaga riset di Kementerian /Lembaga ke Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), termasuk di dalamnya Balitbangtan. Berdasarkan Perpres No 117 tahun 2022 tanggal 21 September 2022, Balitbangtan bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, demikian halnya dengan Peneliti BPTP Sumut yang beralih jabatan menjadi fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.



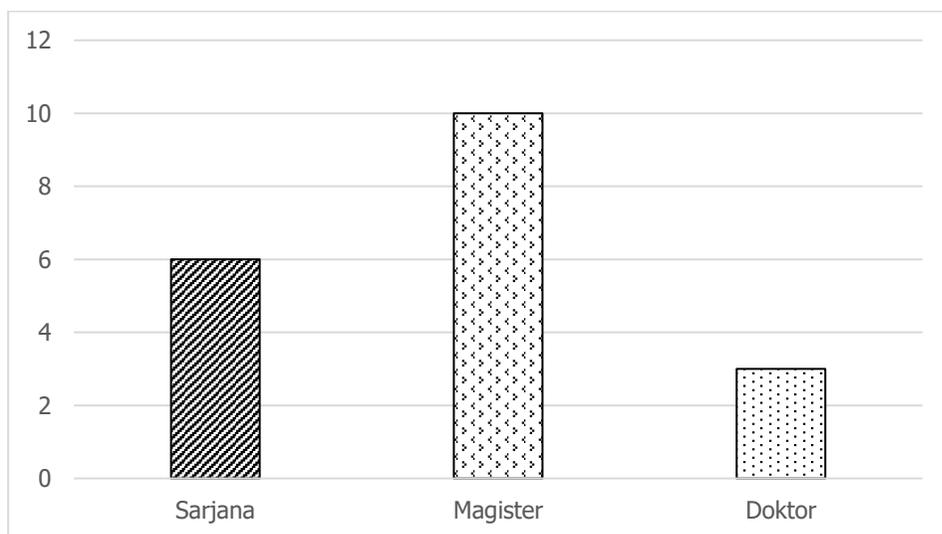
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BPTP Sumatera Utara

Ketenagaan pada BPTP Sumut hingga 31 Desember 2022 adalah 139 orang yang terdiri dari 63 PNS, 2 CPNS dan 48 tenaga kontrak. Komposisi PNS BPTP yang menduduki jabatan fungsional tertentu antara lain Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dan Calon Analis STandarisasi (ASTA) sebanyak 29 orang merupakan jumlah terbanyak komposisi pegawai di BPTP Balitbangtan Sumut, selanjutnya Penyuluh (9), Teknisi (3), Arsiparis (1), Analis kepegawaian (2) dan Pranata Keuangan APBN (2). Komposisi SDM Fungsional BPTP disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi SDM Fungsional BPTP Sumut sampai akhir 2022

Pada tanggal 24 Agustus 2022 dilaksanakan pelantikan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada sebanyak 10 orang pejabat peneliti yang beralih jabatan fungsional menjadi PMHP. Fungsional PMHP dan Penyuluh berasal dari beberapa perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri, antara lain: Jerman 1 orang dan Indonesia 11 orang.



Gambar 3. Sebaran Pendidikan Tenaga Fungsional Peneliti dan Penyuluh BPTP Sumut sampai akhir tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022, dalam melaksanakan mandat, tugas dan fungsinya, BPTP Sumut didukung dengan dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2022 yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp. 44.287.850.000- (empat puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah mengalami beberapa kali revisi terakhir, revisi ke-11 jumlah pagu menjadi Rp. 41.691.800.000- (empat puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Realisasi

Keuangan atas dasar SP2D sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 Rp. 38.354.658.515,- (92 %).

Adanya perubahan struktur anggaran, kegiatan BPTP Sumatera Utara difokuskan pada kegiatan diseminasi inovasi teknologi pertanian dan produksi benih. Produksi DOC ayam KUB, benih sumber padi, dan benih hortikultura (kentang dan bawang merah) masih menjadi fokus kegiatan di 2022. Dalam hal layanan hubungan masyarakat dan informasi pengkajian dan pengembangan dilakukan pelayanan publik. Berada di bawah manajemen pengkajian, kegiatan yang dilakukan antara lain koordinasi manajemen, kerjasama pengkajian, pengadaan fasilitas dan peralatan kantor, penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan.

Produksi benih untuk percepatan diseminasi varietas unggul dan Pengembangan sarana prasarana perbenihan mendukung sasaran produksi komoditas strategis perkebunan dan komoditas ternak. Disamping itu juga pada tahun 2022, BPTP Sumut mendapatkan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Perbenihan Hortikultura di IP2TP Gurgur.

Penyusunan LAKIN Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPTP Sumut Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BPTP Sumut pada tahun mendatang. Pada LAKIN 2022 ini, disajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja BPTP Sumut, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan

antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh untuk melihat akuntabilitas keuangan di BPTP Sumut.

Tujuan penulisan LAKIN ini adalah:

1. Memberikan gambaran kinerja BPTP Sumut selama tahun 2022.
2. Mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BPTP Sumut dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.
4. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance*.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi

Visi Badan Litbang Pertanian merupakan bagian integral dari visi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024. Kementerian Pertanian memiliki visi yakni pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi Badan Litbang Pertanian menjadi Lembaga penelitian dan Pengembangan Terkemuka Penghasil Teknologi dan Inovasi Mendukung Pertanian Maju, Mandiri dan Modern merupakan kebijakan Badan Litbang Pertanian terhadap pembangunan pertanian lima tahun ke depan dan mencapai visi Kementerian Pertanian.

Sebagai instansi vertikal dari Balitbangtan, dan di bawah koordinasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, BPTP Sumut juga mempunyai visi yang mengacu pada instansi induk tersebut. Disamping itu juga, visi BPTP Sumut tidak terlepas dari visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dimana BPTP Sumut berada, karena BPTP Sumut menjadi ujung tombak Balitbangtan dalam menumbuhkan inovasi serta mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi di daerah.

2.2 Misi

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BPTP Sumut, visi dan misi Balitbangtan dan Pemerintah Provinsi Sumut, BPTP Sumut mempunyai visi: menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka di dunia dalam mewujudkan sistem pertanian bio-industri tropika berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang diemban adalah:

1. Menciptakan, merekayasa dan mengembangkan inovasi teknologi dan rekomendasi kebijakan pembangunan di bidang pertanian sesuai dinamika kebutuhan pengguna.
2. Meningkatkan efisiensi dan percepatan diseminasi kepada para pengguna serta meningkatkan penjangkaran umpan balik inovasi pertanian.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka penguasaan IPTEK untuk pengembangan agribisnis dan pembangunan pertanian.
4. Mengembangkan kapasitas institusi BPTP menuju pengelolaan institusi yang profesional dan berintegritas moral tinggi.

2.3. Tujuan

Sesuai mandat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian kepada BPTP Sumut untuk melakukan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian dan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri berbasis *advanced technology* dan *bioscience*, aplikasi IT, dan adaptif terhadap dinamika iklim.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan inovasi pertanian tropika unggul untuk mendukung pengembangan iptek dan pembangunan pertanian nasional.

Tujuan tersebut dijabarkan menjadi beberapa sasaran, antara lain:

1. Tersedianya teknologi dan inovasi budidaya, pasca panen, dan prototipe alsintan.

2. Tersedianya data dan informasi sumberdaya pertanian (lahan, air, iklim dan sumberdaya genetik) berbasis bio-informatika dan geo-spasial dengan dukungan IT.
3. Tersedianya model pengembangan inovasi pertanian, kelembagaan, dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.
4. Tersedia dan terdistribusinya produk inovasi pertanian (benih/bibit sumber, prototipe, peta, data, dan informasi) dan materi transfer teknologi.
5. Penguatan dan perluasan jejaring kerja mendukung terwujudnya lembaga litbang pertanian yang handal dan terkemuka serta meningkatkan HKI.

2.4. Kegiatan

Pada tahun 2022 BPTP Sumut menjalankan dua program yaitu 1) program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, 2) dukungan manajemen.

Tabel 1. Daftar Judul, Penanggung dan Alokasi Anggaran Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi DIPA APBN Tahun 2022 Berdasarkan POK Revisi 1 Tanggal 17 Maret 2022

No.	Judul RDHP/RKTM	Penanggung Jawab	Anggaran (Rp.000)
1.	051. Penyediaan sarana penelitian dan perbenihan	Mustafa Hutagalung, SP, MP	30.000.000
2.	053. Diseminasi Inovasi Teknologi Peternakan		
	Diseminasi dan Produksi DOC ayam KUB di Sumut	Aulia Rahmat Hasyim, S. Pt, MPt	539.100
3.	051. Produksi Benih Sumber Padi	Khasril Atrisiyandi, SP	300.000
4.	051. Pengelolaan Manajemen kerjasama	Listiawati, SP	50.000.000
5.	051. Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	Ahmad Tohir Harahap, SP	156.500
6.	001.Gaji dan Tunjangan	Ahmad Tohir Harahap, SP	8.044.400
7.	002.Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Ahmad Tohir Harahap, SP	2.263.800
8.	051. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Ahmad Tohir Harahap, SP	100.000
9.	051. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Dr. Siti Maryam Harahap, SP, M.Si	851.000
10.	051. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Deliana Putri Agriawati, S.TP, M.Si	132.100

No.	Judul RDHP/RKTM	Penanggung Jawab	Anggaran (Rp.000)
11.	051. Pengelolaan Keuangan	Ahmad Thohir Harahap, SP	110.400
12.	053. Pengelolaan PNBP		440.550
	Pengelolaan PNBP Kegiatan Produksi DOC Ayam KUB	Aulia Rahmat Hasyim, S.Pt, MPt	51.050
	Pengelolaan PNBP Kegiatan IP2TP Pasar Miring	Khasril Atrisiyandi, SP	163.500
	Pengelolaan PNBP Kegiatan IP2TP Gurgur	Jintamin Saragih, SP	110.000

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BPTP Sumut sebagai institusi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pengguna dan pemangku kepentingan di berbagai level terutama di daerah, dituntut untuk berperan secara nyata melalui hasil-hasil kegiatan pengkajian dan diseminasi lingkup BPTP Sumut. Berbagai program yang dilakukan oleh BPTP Sumut untuk mendukung empat target sukses Kementerian Pertanian yaitu:

1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) Peningkatan diversifikasi pangan, 3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing ekspor, dan 4) Peningkatan kesejahteraan petani.

Sejalan dengan mekanisme perencanaan seperti tertuang di Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka rencana kinerja Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja (Renja). Renja merupakan rencana kerja tahunan ditingkat Kementerian atau lembaga yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara RKP merupakan rencana kerja pemerintah tahunan (*annual plan*) yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan kementerian jangka menengah (RPJM Kementerian), yang terdokumentasikan dalam Renstra.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2022, BPTP Sumut yang termasuk dalam lingkup Balai Besar Pengkajian telah mengimplementasikan Kegiatan Prioritas Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja, yang berdasarkan RKA-KL dan POK (Petunjuk Operasional Kinerja). Penyusunan rencana kinerja kegiatan tersebut telah diselaraskan dengan sasaran Renstra BPTP Sumut yang mengacu kepada Renstra Balitbangtan dan BB Pengkajian 2020 –

2024. Rencana Kinerja tersebut memuat Sasaran strategis kegiatan yang akan dilaksanakan. Indikator Kinerja merupakan hasil yang dicapai secara terukur, efektif, efisien, dan akuntabel serta target yang akan dihasilkan. Selanjutnya RKT yang telah disusun ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja (PK) guna mendorong pengembangan menuju *good governance* seperti dapat dilihat pada Tabel 2. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Balai berdasarkan Perjanjian Kinerja 17 Desember 2022 tercantum pada Lampiran 1.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 BPTP Sumut

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (jumlah)	24
		2. Persentase hasil kegiatan pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	100
2.	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	82
3.	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	90

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara pada tahun 2022 menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai. Secara umum, maka realisasi sampai akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa ketiga sasaran tersebut telah dapat dicapai dengan hasil baik.

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja TA. 2021 dengan Target Renstra 2020 – 2024

Rencana Strategis BPTP Sumut 2020-2024 dilaksanakan dengan mengacu Renstra BBP2TP dan Renstra Balitbangtan. Sepanjang kurun waktu pelaksanaan tersebut, terdapat berbagai dinamika dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kondisi pandemik Covid -19 mulai tahun 2019, memberikan perubahan dinamika dalam pencapaian tujuan dan sasaran di tahun 2021. Perubahan struktur anggaran terhadap sejumlah kegiatan pengkajian, dan meningkatnya kegiatan diseminasi melalui kegiatan pendampingan kawasan strategis, produksi padi, bawang merah dan kentang serta kegiatan hilirisasi inovasi teknologi terus dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja utama Balai pada tahun 2022.

Upaya menjalankan tupoksinya BPTP Sumut dalam 5 tahun terakhir ini telah berhasil bekerjasama dengan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi maupun kabupaten dalam beberapa program dan kegiatan. Perkembangan isu strategis yang berpeluang bagi peningkatan peran BPTP sebagai unit pelaksana teknis Badan Litbang Pertanian di daerah ke depan antara lain adanya perhatian Pemerintah Daerah berbasis pada penerapan inovasi pertanian untuk kemajuan pembangunan pertanian di Provinsi Sumut, semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan proses produksi dan distribusi inovasi pertanian dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran serta adanya perlindungan komersialisasi hak kekayaan intelektual (HKI) yang berdampak pada kegairahan menemukan inovasi pertanian yang lebih prospektif.

Upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, BPTP Sumut akan lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), keluaran (output), dan *outcome*.

3.1.2 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Spesifik dan jelas, (2) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) Harus relevan, (4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) Harus fleksibel dan indikator harus (6) Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu (1) Dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan (2) Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja (BBP2TP, 2014). Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Target indikator kinerja sasaran berdasarkan pada Renstra

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian sedangkan realisasi berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2022. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran TA. 2022

No	Sasaran Strategis	Uraian	Indikator kinerja Utama		
			Target		
			Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian spesifik lokasi	Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) (Jumlah)	24	24	100
2.	Terselenggaranya birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	82	93,62	114,18
3.	Terkelolanya anggaran badan penelitian dan pengembangan pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara berdasarkan regulasi yang berlaku (Nilai)	90	90	90,06

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja BPTP Sumatera Utara periode terakhir dari Renstra 2020 - 2024 secara umum menunjukkan hasil

yang relatif telah mencapai keberhasilan dari sasaran yang ditargetkan pada tahun tersebut. Hal ini dapat dicapai karena kegiatan yang telah dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan didukung oleh anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut.

Selain itu kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, intensifnya kegiatan pertemuan Tim Penanggung Jawab Kegiatan di masing-masing unit pelaksana teknis (UPT) untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, input substansi teknis dari para narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan, kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (PMHP, penyuluh, litkayasa dan tenaga administrasi) dan dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan kegiatan. Penjelasan analisis capaian kinerja ini akan dijelaskan berdasarkan sasaran.

Sasaran 1

Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian spesifik lokasi

Capaian sasaran 1 diukur dengan dua indikator kinerja. Indikator kinerja pertama yaitu jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif lima tahun terakhir), sedangkan indikator kinerja kedua yaitu persentase hasil kegiatan (pengkajian dan pengembangan) pertanian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%).

Tabel 4. Capaian kinerja indikator pada Sasaran 1

Indikator kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir) (Jumlah)	Jumlah	24	24	100
Persentase hasil pengkajian (output akhir) spesifik lokasi terhadap seluruh output hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	%	0	0	100

Transformasi kelembagaan yang terjadi di Badan Litbang Pertanian menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan atas pengelolaan dana penelitian/pengkajian yang dibiayai oleh APBN. Pada revisi anggaran ke sebelas, kegiatan penelitian/pengkajian yang telah direncanakan tidak dapat dilanjutkan sehingga tahun 2022 tidak terdapat penambahan target pada indikator satu sasaran satu. Pemanfaatan teknologi spesifik lokasi yang didiseminasikan pada tahun 2022 merupakan teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan secara kumulatif selama 5 tahun penelitian/pengkajian. Realisasi anggaran program riset dan inovasi teknologi pertanian sebesar 92%. Capaian masing-masing indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut.

Indikator Kinerja 1:

Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dimanfaatkan (kumulatif 5 tahun terakhir)

Indikator kinerja 1 dicapai melalui penerapan teknologi spesifik lokasi yang terdiseminasi melalui kegiatan-kegiatan yang dipaparkan sebagai berikut.

Indikator Kinerja 2:

Persentase hasil kegiatan (pengkajian dan pengembangan) spesifik lokasi terhadap seluruh output hasil pengkajian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)

Perubahan kebijakan pada penganggaran kegiatan penelitian/ pengkajian di tahun 2022, menyebabkan tidak ada teknologi spesifik lokasi yang dihasilkan BPTP Sumut pada tahun berjalan. Berdasarkan hal tersebut Perjanjian Kinerja Kepala Balai mengalami perubahan per 17 Desember 2022.

Sasaran kedua dan ketiga dalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai dicapai melalui Kinerja Kepala Tata Usaha (Lampiran 2) dengan indikator pada masing masing sasaran yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas dan Nilai Kinerja Anggaran.

Sasaran 2

Terselenggaranya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima

Indikator Kinerja 3

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (Nilai)

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah, BPTP Sumatera Utara telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas. Nilai Pembangunan Zona Integritas BPTP Sumut melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ka Balai. Tahun 2022, penetapan target Zona Integritas sebesar 82, dan hasil penilaian akhir sebesar 93,62. BPTP Sumatera Utara mendapat peringkat kedua dari 33 UPT Balai Besar Pengkajian yang menunjukkan peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya. Sertifikat capaian nilai ZI terdapat pada Lampiran 2. Secara garis besar, penilaian yang diambil berdasarkan penilaian pengungkit dan hasil. Bentuk penilaian pengungkit diambil berdasarkan kategori pemenuhan dan reform yang masing-masing memiliki penilaian yang berbeda.

Pemenuhan ini diperoleh dari penilaian atas Manajemen Perubahan (1. Penyusunan tim kerja, 2. Rencana Pembangunan Zona Integritas, 3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM, 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja); Penataan Tatalaksana (1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama, 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 3. Keterbukaan informasi publik); Penataan Sistem Manajemen SDM (1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, 2. Pola mutasi internal, 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, 4. Penetapan kinerja individu, 5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai, 6. Sistem informasi kepegawaian); Penguatan Akuntabilitas (1. Keterlibatan pimpinan, 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja); Penguatan pengawasan (1. Pengendalian gratifikasi, 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 3. Pengaduan masyarakat, 4. *Whistle Blowing System*, 5. Penanganan Benturan Kepentingan);

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (1. Standar pelayanan, 2. Budaya Pelayanan Prima, 3. Pengelolaan pengaduan, 4. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan, 5. Pemanfaatan teknologi informasi). Sedangkan penilaian Reform diperoleh berdasarkan Manajemen Perubahan (1. Komitmen dalam perubahan, 2. Komitmen pimpinan, 3. Membangun budaya kerja); Penataan Tatalaksana (1. Peta proses bisnis mempengaruhi penyederhanaan jabatan, 2. System pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi, 3. Transformasi digital memberikan nilai manfaat); Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (1. Kinerja individu, 2. Assessment pegawai, 3. Pelanggaran disiplin pegawai); Penguatan Akuntabilitas (1. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja, 2. Pemberian reward dan punishment, 3. Kerangka logis kinerja); Penguatan Pengawasan (1. Mekanisme pengendalian, 2. Penanganan pengaduan masyarakat, 3. Penyampaian laporan harta kekayaan); Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (1. Upaya dan/atau inovasi pelayanan publik, 2. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi). Selanjutnya bentuk penilaian dari hasil yaitu penilaian birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Terkelolanya dokumentasi dan arsip dengan baik menjadi faktor penting dalam penilaian nilai pembangunan Zona Integritas. Capaian hasil penilaian Zona integritas BPTP Sumut tahun 2022 disajikan pada Lampiran 4.

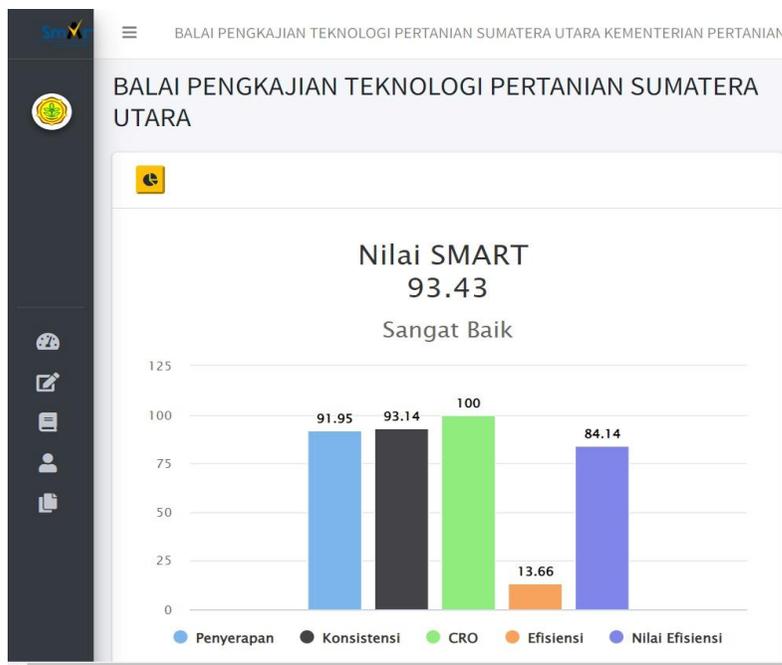
Sasaran 3

Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel

Indikator Kinerja 4

Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara berdasarkan regulasi yang berlaku (Nilai)

Nilai kinerja anggaran BPTP Sumut didapatkan dari 5 poin penilaian antara lain penyerapan, konsistensi, CRO, efisiensi dan nilai efisiensi dari realisasi anggaran maupun kemajuan pelaksanaan masing-masing komponen kegiatan pada setiap bulannya. Gambar 2 menunjukkan nilai kinerja anggaran BPTP Sumut pada tahun 2021. Realisasi nilai kinerja BPTP Sumut melebihi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Balai 2022 (Tabel 3).



Gambar 4. Grafik Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022

Pada tahun 2022, Kinerja Balai juga diperoleh dari capaian Kinerja Sub Koordinator Kerjasama (Lampiran 3). Tabel 6 menunjukkan mitra

kerjasama BPTP Sumut sebagai bagian dari capaian Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Kerjasama. Kegiatan kerjasama BPTP Sumatera Utara 2022 sudah terjalin dengan 16 instansi diantaranya; HKTI, Pemuda Tani Indonesia, Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah, Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Pemerintah Kabupaten Samosir, Pemerintah Kabupaten Langkat, dinas pertanian dan ketahanan pangan Samosir, Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Langkat, dinas pertanian kabupaten Asahan, Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Batubara, Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas, Dinas Pertanian kabupaten Padang Sidempuan, Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal, Fakultas Pertanian USU. Bentuk Kerjasama adalah dalam hal penyediaan narasumber, tenaga ahli, pelatihan magang dan pelaksanaan penelitian di lapangan.

Tabel 6. Mitra Kerjasama 2022 dan Capaian Kegiatan

No.	Mitra kerjasama	Bentuk Kerjasama	Capaian Kegiatan
1	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia	Penelitian, pengembangan dan peningkatan produksi pertanian di Sumatera Utara.	-
2	Pemuda Tani Indonesia (PTI).	Penelitian, pengembangan dan peningkatan produksi pertanian di Sumatera Utara.	Narasumber kegiatan di Pemuda Tani Indonesia
3	Pemkab Tapanuli Tengah	Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan, peternakan, tanaman	Bantuan benih bawang merah ke Pemkab Tapanuli Tengah

No.	Mitra kerjasama	Bentuk Kerjasama	Capaian Kegiatan
		pangan dan hortikultura.	
4	Pemkab Langkat	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Pelaksanaan bimbingan teknis
5	Pemkab Samosir	peningkatan produksi dan pengembangan tanaman perkebunan, pangan , hortikultura dan peternakan.	Sebagai staf ahli pada kegiatan master plan kabupaten Samosir Narasumber kegiatan di Kabupaten Samosir
6	Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara	Tridharma perguruan tinggi dalam rangka MBKM.	Narasumber Kuliah Umum, pelaksanaan praktek kerja lapang
7	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.	pengembangan pendampingan dan peningkatan produksi pertanian Sumatera Utara.	P
8	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.	Telah dilaksanakan pertemuan FGD untuk kurikulum tahun 2022, pelaksanaan magang dan riset di BPTP Sumatera Utara
9	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.	Bantuan benih padi ke Padang Sidempuan
10	Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas	pendampingan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.	
11	Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara	Pendampingan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.	

No.	Mitra kerjasama	Bentuk Kerjasama	Capaian Kegiatan
12	Dinas Pertanian Mandailing Natal	Pendampingan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.	
13	Dinas Pertanian Padang Sidempuan	Pendampingan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.	
14	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara	pendampingan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.	
	Dinas Pertanian Kabupaten Asahan	pendampingan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	

IV. AKUNTABILITAS KEUANGAN

4.1. Realisasi Keuangan

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumut berdasarkan DIPA Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2022, mengelola anggaran sebesar Rp. 44.287.850.000- (empat puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah mengalami beberapa kali revisi terakhir, revisi ke-11 jumlah pagu menjadi Rp. 41.691.800.000- (empat puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Realisasi Keuangan atas dasar SP2D sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 Rp. 38.354.658.515,- (92 %). Secara rinci persentase realisasi anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 4.

4.2 Pengelolaan PNBP

Pengelolaan PNBP merujuk pada PP 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Pertanian. Pada tahun 2021, realisasi PNBP sebesar Rp. 562.015.721,- atau 122,18% dari anggaran Rp. 460.000.000,-. (Tabel 8).

Tabel 8. Rincian PNBP TA. 2021

Uraian	MAK	2021		
		Target	Realisasi	%
Sewa rumah dinas	425131	10.000.000	8.177.721	81,78
Sewa mess	425131			
Pengembalian Belanja	425913		2.900.000	

Pendapatan Denda Pekerjaan	425811			
Laboratorium	425289	100.000.000	130.805.000	130,81
Penjualan Hasil Pertanian KP Pasar Miring (Fungsional)	425434	250.000.000	226.651.500	90,66
Penjualan Hasil Pertanian KP Pasar Miring (Umum)	425119			
Penjualan Hasil Pertanian KP Gurgur	425434	100.000.000	108.077.000	108,08
Penjualan Sayuran KRPL (000346)	425434		2.602.000	
Penjualan Ayam DOC (001677)	425434		82.802.500	
Jumlah		460.000.000	562.015.721	122,18

V. PENUTUP

5.1 Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumut Tahun 2021 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja kegiatan BPTP Sumut tahun 2021. Umumnya indikator kinerja utama telah terealisasi sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, bahkan beberapa indikator telah melampaui target dengan realisasi anggaran 99,2%. Hal ini berarti kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan dengan baik. Optimalisasi Kebun Percobaan dan Penguatan database merupakan perkembangan baik pada capaian kinerja balai tahun ini.

Laporan akuntabilitas ini merupakan bahan evaluasi dan pertanggung-jawaban atas kebijakan yang telah dilaksanakan sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas di masa mendatang. Alternatif solusi dapat ditempuh antara lain dengan melakukan perencanaan dan perancangan program/kegiatan dengan matang, peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan yang mampu mengiringi perkembangan zaman dan mengatasi permasalahan yang muncul, peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan serta pemantapan kelembagaan/organisasi dengan pola pengelolaan yang transparan dan efisien.

Indikator hasil, evaluasi secara umum menunjukkan bahwa kegiatan BPTP Sumut memiliki hasil yang baik bagi penggunaannya. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Perbaikan kinerja dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kerjasama yang baik dengan instansi

terkait, sehingga kualitas kegiatan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik bagi pengambil kebijakan maupun petani, sebagai pengguna akhir paket teknologi yang dihasilkan selama ini.

BPTP Sumut menghadapi berbagai hambatan dan kendala internal maupun eksternal dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan internal berkaitan dengan beragamnya pemahaman terhadap pencapaian target kinerja dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga berpengaruh kepada komitmen yang berbeda. Sedangkan hambatan eksternal yang memengaruhi capaian kinerja adalah masa pandemi COVID 19 dan seringkali berkaitan dengan tidak adanya kesinambungan koordinasi dengan pemerintah daerah yang diakibatkan oleh adanya dinamika perubahan struktural daerah.

5.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Dalam upaya memperbaiki Kinerja BPTP Sumatera Utara perlu disampaikan saran untuk ke dalam (internal) dan ke luar (eksternal) BPTP Sumatera Utara. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlu ada pembinaan secara sistematis terhadap SDM peneliti dan penyuluh untuk lebih meningkatkan kompetensi baik melalui jalur formal maupun informal.
- b. Perlu terus dilakukan perbaikan dan pengembangan serta meningkatkan kelengkapan secara berkelanjutan data base informasi kegiatan balai termasuk teknologi tepat guna untuk merespon dan mengantisipasi kebutuhan informasi teknologi yang sangat beragam oleh petani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan.
- c. Mempererat jaringan litkaji dan diseminasi dengan Puslit dan Balit Komoditas.

Lampiran 1. Penetapan Kinerja (PK) Kepala BPTP Sumut 2022 Tertanggal
13 Desember 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khadjah EL Ramija

Jabatan : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebananya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

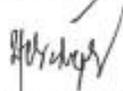
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 13 Desember 2021

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Pihak Pertama


Khadjah EL Ramija

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian Spesifik Lokasi	1. Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan Pertanian Spesifik Lokasi yang dimanfaatkan (jumlah)	24
		2. Persentase hasil kegiatan pengkajian dan pengembangan pertanian spesifik lokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan (%)	100
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	82
3	Terkelolanya Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	90

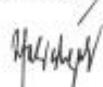
No	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Riset dan Inovasi IPTEK		
1	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	Rp.	32.189.100.000
	Program Dukungan Manajemen		
2	Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp.	12.098.750.000

Medan, 13 Desember 2021

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian


Fadry Djufry

Kepala Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Sumatera Utara


Khadijah El. Ramija

Lampiran 2.

	POK awal 17-11- 2021	Revisi 1 17-03- 2022	Revisi 2 13-05- 2022	Revisi 3 03-06- 2022	Revisi 4 08-06- 2022	Revisi 5 08-07- 2022	Revisi 6 27-09- 2022	Revisi 7 14-10- 2022	Revisi 8 25-10- 2022
051. Penyediaan sarana penelitian dan perbenihan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
053. Diseminasi Inovasi Teknologi Peternakan	539.100	539.100	539.100				539.100	497.600	497.600
051. Produksi Benih Sumber Padi	300.000	300.000	300.000				300.000	300.000	300.000
B Produksi Benih Sumber Padi 12 ton (FS dan SS)	-	-	-				200.000	200.000	200.000
051. Produksi benih sebar kentang	-	-	-				100.000	100.000	100.000
051. Pengelola									
051. Pengelolaan Manajemen kerjasama			50.000				50.000	50.000	50.000
051. Layanan Kerumahtanggan dan Umum	156.500	156.500	444.500				444.500	444.500	444.500
A. Layanan Umum									
01. Gaji dan Tunjangan	8.044.400	8.044.400	8/044.400				7.777.490		7.777.490

002.Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.263.800	2.263.800	2.263.800				2.263.800		2.263.800
051. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	100.000	100.000							
051. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	851.000	851.000	851.000				1001000		951.000
051. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	132.100	132.100	93.100				93.100		93.100
051. Pengelolaan Keuangan	110.400	110.400	99.400				99.400		99.400
053. Pengelolaan PNBPN	440.550	440.550	440.550				440.550		440.550

Lampiran 3. Nilai Pembangunan Zona Integritas

Penilaian		Bobot	Nilai	%	
A. PENGUNGKIT					
		60.00	59.57		
I.	PEMENUHAN		30.00	29.57	98.58%
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00	3.81	95.31%
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	3.50	3.50	100.00%
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00	4.97	99.45%
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00	4.84	96.88%
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7.50	7.50	100.00%
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00	4.95	98.90%
II.	REFORM		30.00	30.00	100.00%
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00	4.00	100.00%
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	3.50	3.50	100.00%
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00	5.00	100.00%
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00	5.00	100.00%
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7.50	7.50	100.00%
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00	5.00	100.00%
TOTAL PENGUNGKIT			59.57	99.29%	
B. HASIL					
		40.00	34.05		
I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22.50	19.13	85.03%
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17.50	14.13	80.75%
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00	5.00	100.00%
II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17.50	14.92	85.25%
	a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal:	17.50	14.92	85.25%

		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)			
TOTAL HASIL				34.05	85.13%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				93.62	

Lampiran 4. Realisasi Keuangan

No	Uraian	Persentase Realisasi Kinerja (%)
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kultur Jaringan (Kentang Bawang Merah dan Bawang Putih di IP2TP Gurgur)	86,34
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91,72
	Perengkapan Scren House Aklimatisasi	99,93
	AC split	100,00
	Meubelair	100,00
	Lemari	100,00
	Meja dan kursi analis	100,00
	Genset	100,00
	Peralatan dan Mesin Laboratorium Kultur Jaringan	98,85
	Peralatan pendukung Lab. Kultur Jaringan (bahan kimia)	0,00
	Pengadaan Rak dan Lampu Lab. Kultur Jaringan	100,00
	Pengadaan Peralatan Klinik Agribisnis	100,00
	Pengadaan Running Teks IP2TP Gurgur	100,00
	Pengadaan Peralatan Pendukung Lab. Kultur Jaringan	0,00
	Pengadaan Perlengkapan Perbenihan Hortikultura	100,00
	Infocus dan layar	100,00
	Komputer PC	99,81
	Laptop	100,00
	Printer	100,00
	b. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	61,97
	- Upah tenaga kerja lapangan (UHL)	95,34
	- Honorarium Pengelola Teknis	59,05
	- Upah Tenaga Kerja Analis Lab. Kultur Jaringan	50,00
	- Upah Harian Lepas (UHL) Lapangan	33,24
	c. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0,00
	Konsultan Perencanaan	0,00

		Konsultan Pengawasan	0,00
		Konsultan KAN Lab. Kultur Jaringan	0,00
	d.	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	99,37
		Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelaksanaan	99,37
	e.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90,90
		Pembangunan laboratorium Kultur Jaringan	90,90
	f.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0,00
		Belanja Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0,00
	g.	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	99,96
		Konsultan Pengawasan	99,93
		Konsultan Perencanaan	100,00
	h.	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	100,00
		Perjalanan Dinas Pengelola Kegiatan	100,00
	2.	Renovasi Gedung dan Bangunan	97,89
	a.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0,00
		Honorarium Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0,00
	b.	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	94,82
		Konsultan Perencanaan	99,99
		Konsultan Pengawasan	87,07
	c.	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	99,42
		Perjalanan Dinas Pengelola Kegiatan	99,42
	d.	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	99,98
		Rehab Ringan Tembok Penahan Tanah	100,00
		Rehab Ringan Gorong-gorong	100,00
		Rehab Ringan Screen House IP2TP Gurgur	100,00
		Rehab Sedang Mess IP2TP Gurgur	100,00
		Rehab Sedang Rumah Kepala IP2TP Gurgur	99,89
		Rehab sedang lantai jemur	100,00
	3.	Pembangunan Sarana Pendukung Perbenihan Hortikultura	79,06
	a.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0,00

		Honorarium Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0,00
	b.	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	94,92
		Konsultan Perencanaan	99,91
		Konsultan Pengawasan	87,45
	c.	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	95,09
		Perjalanan Dinas Pengelola Kegiatan	95,09
	d.	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	78,10
		Pembangunan Klinik Agribisnis	90,45
		Pembangunan Gajebo	100,00
		Pembuatan Saung	100,00
		Pembangunan Gapura	0,00
		Pembangunan Pos Satpam	100,00
4.		Pembangunan Screen House Perbenihan Hortikultura	90,46
	a.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90,34
		Pembangunan Screen House Aklimatisasi	90,99
		Pembangunan Screen House Kentang	89,91
	b.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	29,67
		Honorarium Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	29,67
	c.	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	100,00
		Konsultan Perencanaan	100,00
		Konsultan Pengawasan	100,00
	d.	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	99,95
		Perjalanan Dinas Pengelola Kegiatan	99,95
5.		Pembangunan Smart Green House dan Rumah Perbibitan	90,11
	a.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90,23
		Pembangunan Smart Green House	89,33
		Pembangunan Rumah Perbibitan	92,04
	b.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0,00
		Honorarium Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0,00
	c.	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	99,98
		Konsultan Perencanaan	99,97

		Konsultan Pengawasan	100,00
	d.	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	100,00
		Perjalanan Dinas Pengelola Kegiatan	100,00
6.		Pembangunan Rumah Jaga dan Pagar	93,86
	a.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94,65
		Pembangunan Pagar Depan IP2TP Gurgur	100,00
		Pembangunan Pagar Taman IP2TP Gurgur	100,00
		Pembangunan Pagar Samping (Panel Beton)	96,95
		Pembangunan Rumah Pekerja	92,99
		Pembangunan Musholla	91,44
	b.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0.00
		Honorarium Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0.00
	c.	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	98.28
		Konsultan Perencanaan	0.00
		Konsultan Pengawasan	0.00
	d.	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	98.28
		Perjalanan Dinas Pengelola Kegiatan	0.00
7.		Pembangunan Gudang Pupuk dan Alsintan	0.00
	a.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.28
		Pembangunan Gudang Benih Kentang	0.00
		Pembangunan Gudang Pupuk	0.00
		Pembangunan Gudang Alsintan	98.28
	b.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0.00
		Honorarium Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0.00
	c.	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	98.85
		Konsultan Perencanaan	0.00
		Konsultan Pengawasan	0.00
	d.	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	98.85
		Perjalanan Dinas Pengelola Kegiatan	0.00
8.		Pembangunan Gudang Bawang Merah dan B. Putih	0.00
	a.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.85
		Pembangunan Gudang Benih Bawang Merah	0.00
		Pembangunan Gudang Benih Bawang Putih	0.00

	b.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	95,66
		Honorarium Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	92,14
	c.	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	100,00
		Konsultan Perencanaan	98,37
		Konsultan Pengawasan	98,37
	d.	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	88,27
		Perjalanan Dinas Pengelola Kegiatan	87,96
9.		Pembangunan Jalan Usahatani	87,96
	a.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	87,96
		Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Drainase	87,96
	b.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan	30,40
		Honorarium Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	30,40
	c.	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	99,98
		Konsultan Perencanaan	99,97
		Konsultan Pengawasan	100,00
	d.	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	97,77
		Perjalanan Dinas Pengelola Kegiatan	97,77
10.		Peningkatan Jalan Usahatani	93,35
	a.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan	0,00
		Honorarium Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	0,00
	b.	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	67,89
		Konsultan Perencanaan	99,98
		Konsultan Pengawasan	22,06
	c.	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	97,57
		Perjalanan Dinas Pengelola Kegiatan	97,57
	d.	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	96,38
		Peningkatan Jalan Usaha Tani dan Drainase	95,59
		Pemasangan Paving Block	100,00
		Pemasangan Tembok Penahan Tanah	99,99
11.		Pembangunan Irigasi Mendukung Perbenihan Hortikultura	81,78

	a.	Belanja Modal Irigasi	83.83
		Pemasangan Pipa Irigasi dan Bak Penampung	100.00
		Pemasangan Pipa Distribusi dan Springkel	100.00
		Pemasangan Pipa Air Bersih	0.00
		Pembuatan Sumur Dalam	100.00
		Pembuatan Embung dan Rumah Pompa	100.00
	b.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	0.00
		Honorarium Pengelola Teknis irigasi	0.00
	c.	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	93.38
		Konsultan Perencanaan	99.85
		Konsultan Pengawasan	83.67
	d.	Belanja Modal Perjalanan Irigasi	36.17
		Perjalanan Dinas Pengelola Kegiatan	36.17
12.		Pemasangan Jaringan Mendukung Perbenihan Hortikultura	83.23
	a.	Belanja Modal Jaringan	100.00
		Pemasangan Jaringan Internet	100.00
		Pemasangan Jaringan Instalasi CCTV	100.00
		Penambahan Daya dan Jasa Listrik	100.00
	b.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0.00
		Honorarium Pengelola Teknis Jaringan	0.00
	c.	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	0.00
		Konsultan Perencanaan	0.00 %
		Konsultan Pengawasan	0.00 %
	d.	Belanja Modal Perjalanan Jaringan	0.00 %
		Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelaksanaan	0.00 %
13.		Peralatan dan Mesin Mendukung Perbenihan Hortikultura	93.87
	a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.59
		Pengadaan Lampu Jalan	99.90
		Pengadaan Keranjang Benih Kentang	100.00
		Pengadaan Conveyor	100.00
		Perlengkapan Screen House Kentang	100.00
		Pengadaan Big Gun untuk tanaman	100.00
		Perlengkapan Rumah Jaga dan Mess	100.00
		Pembuatan Plank Nama	100.00

		Pengadaan Bak Trailer 2 roda	100,00
		Pengadaan Cangkul	100,00
		Pengadaan Tangga Segitiga	100,00
		Pengadaan Mesin Pompa Air	100,00
		Pembuatan Baleho	100,00
		Peralatan Pendukung Smart Green House	99,98
		Perlengkapan Gudang Benih Bawang Merah	100,00
		Perlengkapan Gudang Benih Bawang Putih	100,00
		Perlengkapan Gudang Benih Bawang Kentang	100,00
		Perlengkapan Rumah Pembibitan	85,00
		Pengadaan Alat Pembuatan Bedengan	100,00
		Pengadaan Alat Panen Kentang	100,00
	b.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	0,00
		Honorarium Pengelola Teknis	0,00
	c.	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0,00
		Konsultan Perencanaan	0,00
		Konsultan Pengawasan	0,00
	d.	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0,00
		Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelaksanaan	0,00
14.		Pematangan Lahan Perbenihan Hortikultura	100,00
	a.	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	100,00
		Pematangan Lahan (Land Clearing, Trasing dan Papras	100,00
15.		Pembuatan Master Plant dan Data Base	0,00
	a.	Belanja Modal Lainnya	0,00
		Master Plant, 3D dan Data Base Lahan	0,00
16.		Diseminasi dan Produksi DOC Ayam KUB di Sumut	100,00
17.		Produksi Benih Sumber Padi (12 Ton)	100,00
18.		Produksi Benih Sumber Padi 12 Ton (Fs Dan Ss)	99,99
19.		Produksi Benih Sebar Kentang (1 Ton)	99,89
20.		Kerjasama	99,86
21.		Layanan Umum	99,79
22.		Layanan Manajemen Kepegawaian, Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan	93,45
23.		Pelayanan Humas dan Protokoler	99,95
24.		Pemeliharaan Kebun	100,00
25.		Pembayaran Gaji dan Tunjangan	98,03

26.	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	99,92
27.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bangunan	100.00
28.	Pembayaran Listrik, Air Dan Telepon	91,30
29.	Penyusunan Perencanaan Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	99.96
30.	Koordinasi dan Sinkronisasi Manajemen Balitbangtan	100.00
31.	Sinkronisasi Kegiatan Manajemen	99.14
32.	Pendampingan Kawasan di Sumatera Utara	92.96
33.	Perencanaan Standar Instrumen Spesifik Lokasi	98.19
34.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	99.83
35.	Penguatan Base Line	99.92
36.	UAPPA/B-W Kementerian Pertanian	99.80
36.	Pengelolaan PNBK Kegiatan Produksi DOC Ayam KUB	88.24
37.	Pengelolaan PNBK Kegiatan Laboratorium	99.77
38.	Pengelolaan PNBK Kegiatan IP2TP Pasar Miring	100.00
39.	Pengelolaan PNBK Kegiatan IP2TP Pasar Gurgur	99.90

Lampiran 6. Laporan progres kegiatan pada Aplikasi SMART